
**MAKNA ZONA MERAH COVID 19 DI DKI JAKARTA
(STUDI SEMIOTIKA CHARLES SANDER PEIRCE BERITA
KOMPAS.COM)**

***MEANING OF THE RED ZONE COVID 19 IN DKI JAKARTA
(KOMPAS.COM CHARLES SANDER PEIRCE SEMIOTICS STUDY)***

Pitoyo, Edy Prihantoro, Noviawan Rasyid Ohorella*

Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma

ABSTRACT

The Covid 19 pandemic that has hit the world has caught the attention of all heads of state, including the Indonesian government. The Indonesian government is swiftly taking preventive measures to prevent all its citizens from being infected with the Covid 19 outbreak. The Government of the Special Capital Region of Jakarta (DKI) as the center of government and business activities takes preventive measures so that Jakarta does not become the epicenter of the spread of Covid 19. Jakarta with a population 10.57 million people according to data from the Central Statistics Agency (BPS) under the leadership of Governor Anies Rashid Baswedan took preventive steps by implementing the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy. This PSBB is implemented so that the Covid 19 red zone does not spread throughout the DKI area and also does not spread to other places. This study aims to analyze the meaning of the Covid 19 red zone in the news on kompas.com. The word Covid 19 red zone conveyed by the Governor of DKI published on kompas.com was studied using Charles Sanders Peirce's semiotic study of meaning. According to Peirce, signs are related to the objects that resemble them, their existence has a causal relationship with signs or because of conventional ties to these signs. The results of this study indicate that there is a lack of clarity in the interpretation of the Covid 19 red zone by the DKI government which is published on kompas.com. This study also provides advice to the government in communicating in online media in giving meaning to the red zone of Covid 19.

Keywords: *semiotics, covid 19, governor of DKI, kompas.com*

ABSTRAK

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia menjadi perhatian semua kepala negara termasuk pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan sigap melakukan tindakan preventif untuk menghindarkan semua warganya agar tidak terjangkit wabah Covid 19. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis melakukan langkah-langkah pencegahan agar Jakarta tidak menjadi episentrum penyebaran Covid 19. Jakarta dengan jumlah penduduk 10,57 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di bawah pimpinan Gubernur Anies Rashid Baswedan melakukan langkah preventif dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB ini diterapkan agar zona merah Covid 19 tidak meluas ke seluruh wilayah DKI dan juga tidak menyebar ke tempat lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa makna zona merah Covid 19 di pemberitaan kompas.com. Kata zona merah Covid 19 yang disampaikan Gubernur DKI yang dimuat di kompas.com ini dikaji dengan menggunakan studi pemaknaan semiotika Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan sebab akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kurang jelasnya dalam pemaknaan tentang zona merah Covid 19 oleh

* Korespondensi Penulis

Email: pit3ismail@gmail.com
edipri@staff.gunadarma.ac.id
noviawanrasyid@gmail.com

pemerintah DKI yang dimuat di kompas.com. Penelitian ini juga memberikan saran pada pemerintah dalam berkomunikasi di media online dalam memberikan makna zona merah Covid 19.

Kata Kunci: semiotika, covid 19, gubernur DKI

PENDAHULUAN

Tersebarnya Corona Virus Desease (Covid) 19 di seluruh dunia termasuk ke negeri Indonesia, mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Kehidupan normal tanpa ada beban kekhawatiran hingga ketakutan pada sesama manusia, berubah menjadi rasa saling curiga dengan sesama manusia dan benda-benda yang ada di sekitarnya.

Perubahan perilaku manusia ini dinilai wajar karena keberadaan virus corona tidak kasat mata. Penyebarannya pun secara cepat dari manusia ke manusia. Menurut data WHO penyebaran Covid 19 ini bermula dari Wuhan China pada akhir tahun 2019, dalam waktu singkat dapat menyebar ke seluruh dunia.

Sumber berita yang dimuat di media massa, media online dan media sosial pun beraneka ragam, mulai dari informasi resmi World Health Organization (WHO), kepala negara hingga menteri. Di negeri Indonesia, pernyataan pertama oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa ada warga negara Indonesia yang terjangkit Covid 19, pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ada dua warga negara Indonesia yang berusia 62 tahun dan putrinya 31 tahun terinfeksi Covid 19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang juga terinfeksi Covid 19.

Sejak saat itu pemerintah mulai mengeluarkan keputusan agar setiap warga negara Indonesia mengikuti protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid 19 di Indonesia secara cepat. Kebijakan pemerintah pusat ini kemudian mendapat respon cepat dari Gubernur Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta, Dr Anies Rasyid Baswedan, dengan membuat kebijakan pembatasan sosial di masyarakat.

Kebijakan Gubernur Anies ini didasarkan pada tingkat mobilitas masyarakat di Ibukota Jakarta yang sangat tinggi. Jakarta sebagai ibukota negara menjadi pertemuan semua orang dari berbagai daerah dan negara. Kerumunan

manusia di ibukota ini dapat memicu penyebaran Covid 19 secara cepat.

Jakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 10,57 juta jiwa berdasarkan survei penduduk antar sensus (SUPAS) pada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini menjadikan Jakarta sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Selain itu, Jakarta juga kota dengan keberagaman penduduk baik dari berbagai suku di Indonesia maupun dari manca negara.

Pusat bisnis dan politik yang menjadi predikat DKI Jakarta memungkinkan setiap orang untuk datang beraktivitas dalam berbagai bentuk di Jakarta. Hal ini memungkinkan terjadinya penyebaran Covid 19 secara cepat. Sebagaimana WHO terapkan protokol kesehatan penyebaran Covid 19 dapat terjadi di kerumunan manusia dengan jarak kurang dari satu meter.

Kerumunan atau manusia berkumpul dalam jarak berdekatan di DKI Jakarta sudah menjadi kewajiban, khususnya di tempat-tempat umum dan angkutan umum, yang beroperasi hampir 24 jam. Pemerintah DKI Jakarta pun perlu mengambil kebijakan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan membuat jarak antar manusia dalam setiap beraktivitas dan menjaga stamina tubuh serta selalu menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap kali selesai beraktivitas.

Padatnya kegiatan di DKI Jakarta, tidak memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan membuat jarak satu meter dengan manusia lainnya. Hal inilah yang mendesak pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sebelum menerapkan kebijakan PSBB, pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta membuat kesepakatan tentang skala risiko di suatu daerah yang terinfeksi Covid 19 dengan empat kategori zona. Zona Merah, Zona Orange, Zona Kuning dan Zona Hijau.

Keempat kategori tersebut dilengkapi dengan protokol kesehatan yang mengikutinya, dengan tujuan agar perhatian di setiap daerah tidak disamaratakan, namun disesuaikan dengan kategori zona yang ada. Gubernur Anies seringkali menyebutkan Jakarta sebagai episentrum Covid 19, sehingga perlu ada tindakan tegas dalam bentuk pembatasan sosial dengan durasi 14 hari agar penyebaran Covid 19 dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

Pembagian wilayah yang terinfeksi Covid 19 dengan kategori zona ini menjadi bahan kajian yang menarik. Penulis untuk mengkaji pembagian zona wilayah yang terinfeksi Covid 19 dengan menggunakan empat warna, merah, orange, kuning dan hijau.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang makna zona merah di DKI Jakarta ini dengan menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Adapun yang menjadi dasar kajian adalah pemberitaan tentang zona merah di Jakarta yang dimuat oleh portal berita kompas.com mulai 2 Maret – 3 Juli 2020. Portal berita online kompas.com, dalam rentang waktu tersebut memuat berita tentang zona merah di DKI Jakarta sebanyak 17 berita.

Pembagian zona berdasarkan risiko penyebaran Covid 19 pertama kali disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Doni Monardo pada 30 Mei 2020. Pemetaan wilayah berdasarkan zona ini dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah dalam menangani penyebaran Covid 19.

Pemetaan wilayah dengan menggunakan warna merah, orange, kuning dan hijau ini menjadi perhatian penulis, mengingat berdasarkan berita yang dimuat kompas.com, tidak satupun adanya informasi tentang alasan pemerintah menggunakan atau memilih warna merah sebagai bentuk risiko tinggi. Apakah pemilihan warna merah dalam zona merah ada kaitannya dengan lambang negara merah putih? Apakah warna merah pada zona merah ini juga sama dengan makna ikon merah pada lampu lalu lintas di perempatan jalan di kota-kota, yang berlaku secara universal?

Tujuan pada kajian ini lebih menekankan pada apa makna representamen (tanda) zona merah pada

penetapan status zona merah Covid 19? Apa makna DKI Jakarta sebagai objek penerapan status Zona Merah Covid 19? Bagaimana masyarakat Jakarta sebagai interpretan memaknai zona merah Covid 19?

Kerangka Konseptual

Bencana Covid 19 di negeri ini selain menimbulkan kegaduhan di dalam negeri, karena ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan yang ditimbulkan oleh pernyataan dari pejabat pemerintah, pakar politik, ekonomi dan kedokteran hingga mikrobiologi dan lainnya. Bila dicermati banyak kata atau istilah baru yang muncul diantaranya zona merah, *social distancing*, *physical distancing*, relaksasi.

Zona merah merupakan diksi baru yang berkaitan dengan wilayah yang dianggap berbahaya atau menurut pemerintah dinilai menjadi wilayah yang penyebaran Covid 19 paling banyak. Belum ada keterangan yang menjelaskan baik secara kualitatif maupun kuantitatif tentang makna zona merah, sebagaimana yang dimuat di kompas.com.

Kata zona dalam kajian komunikasi selalu mengacu pada ruang dan jarak, sebagaimana dijelaskan oleh seorang sosiolog, Edward Hall. Hall menyebut ada empat zona dalam kehidupan masyarakat yakni intim, personal, sosial dan publik. Masing-masing zona tersebut dibedakan oleh sebuah jarak. 1). Jarak Intim (*intimate distance*), zona ini mencakup perilaku yang ada pada jarak antara 0 – 18 inci (46 cm). Perilaku-perilaku ini termasuk perilaku yang bervariasi mulai dari sentuhan hingga mengamati bentuk wajah seseorang. 2). Jarak Personal (*personal distance*), zona ini mencakup perilaku yang terdapat pada area yang berkisar antara 18 inci (46 cm) sampai dengan 4 kaki (1,2 meter). Perilaku dalam jarak personal bergandengan tangan hingga menjaga jarak dengan seseorang sejauh Panjang lengan. 3). Jarak Sosial (*social space*) dengan kisaran 4-12 kaki (1,2 – 3,6 meter). Kategori Jarak Sosial menggambarkan budaya percakapan. 4). Jarak Publik (*public space*) jarak yang melebihi 12 kaki (3,7 meter). Jarak ini biasanya digunakan untuk diskusi formal, di dalam kelas antara guru dan murid, serta kegiatan kegamaan antara guru agama dengan umatnya. (West, 2008 : 155).

Berdasar teori Hall ini maka penggunaan diksi zona merah tentu saja mengacu pada ruang dan jarak. Hanya saja yang membedakan dari teori Hall dengan jarak sosial maupun jarak fisik pada covid 19 adalah berdasarkan kemampuan penularan virus corona dari manusia ke manusia lainnya.

Pada penelitian ini, penggunaan kata zona menyerupai batasan jarak pada teori ruang dan jarak yang digunakan Hall. Jarak yang diterapkan WHO guna menghindari Covid 19 tidak berbeda jauh dengan jarak yang dibuat berdasarkan kajian Hall yakni berkisar 1 – 1,5 meter, sehingga masuk dalam kategori jarak personal (personal distance)

Adapun pemberian warna merah pada zona, tentu pemerintah juga memiliki makna tersendiri. Hanya saja warna merah pada diksi zona merah juga tidak dijelaskan secara rinci mengapa memilih warna merah? Untuk itu, penulis mengkaji tentang bagaimana makna warna dalam kajian komunikasi.

Warna dalam pelbagai wujud merupakan dasar dari banyak aktivitas pembuatan dan menggunakan tanda di seluruh dunia. Pada level denotatif, manusia menafsirkan tanda berupa warna sebagai gradasi dari rona pada spektrum cahaya. Rona adalah ciri yang menuntun manusia dalam pemberian nama pada warna – misalnya, warna merah, oranye, kuning, biru atau violet. Proses penamaan warna ini tidak terbebas dari factor pribadi dan budaya. (Danesi, 2012 : 80)

Para ahli memperkirakan bahwa manusia mungkin dapat membedakan sampai sepuluh juta warna. Oleh karena itu, jelas bahwa jumlah istilah warna yang terbatas sangat tidak tepat untuk menggambarkan secara akurat semua warna yang berpotensi untuk dilihat. Batasan yang diterapkan pada persepsi warna oleh kosakata warna adalah alasan mengapa orang sering mengalami kesulitan dalam berupaya mendeskripsikan atau mencocokkan satu warna tertentu.

Di seluruh dunia warna-warna digunakan untuk tujuan konotatif. Berdasarkan catatan arkeologis dengan kuat menyiratkan bahwa pada kenyataannya makna inderawi dan emosional yang dilekatkan pada warna merupakan istilah-

istilah warna itu sendiri (Wescot, 1980). Dalam Bahasa Hittite (saat ini masuk wilayah Turki, Syria, Lebanon dan Cyprus) misalnya kata -kata untuk warna awalnya merujuk pada nama-nama tanaman dan pohon seperti poplar, elm, ceri, oak dan seterusnya, dalam Bahasa Ibrani, nama manusia pertama Adam, berarti “merah” dan “hidup”, dan hari ini pun, dalam banyak bahasa, merah menandakan “hidup” dan “Indah”.

Penggunaan istilah warna secara konotatif tersebar lebih luas dibanding perkiraan pada awalnya. (Berger, 2015 : 59) Berikut beberapa contoh dalam bahasa Inggris untuk warna merah:

- Red carpet treatment (perlakuan istimewa)
- Into the red (berutang)
- Red herring (sesuatu yang digunakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya)
- Red light district (area di sebuah kota untuk aktivitas seksual dan tempat-tempat seperti rumah bordil)
- Red tape (sangat bersifat birokratis).

Pada dasarnya, warna adalah tanda-tanda yang dapat kita gunakan untuk merepresentasikan apapun yang dinilai sesuai.

Semiotika Peirce

Studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja disebut semiotika atau semiologi (Fiske, 2010: 63-64). Semiotika mempunyai tiga bidang studi utama:

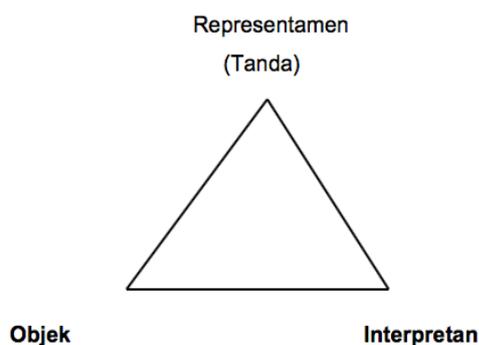
- 1) tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang berbeda, cara tanda-tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna, dan cara tanda-tanda itu terkait dengan manusia yang menggunakannya. Tanda adalah konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam artian manusia yang menggunakannya.
- 2) Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara berbagai kode dikembangkan guna memenuhi

kebutuhan suatu masyarakat atau budaya atau mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia untuk menstranisikannya.

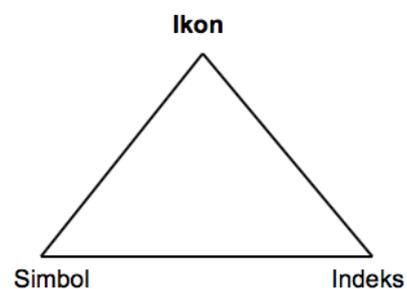
- 3) Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja, ini pada gilirannya bergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuk sendiri.

Pada kajian ini lebih menekankan pada semiotika modern yang digagas oleh Charles Sander Peirce. Peirce dan dilahirkan di Cambridge, Massachusetts tahun 1839. Ia menimba ilmu di Harvard University, dan memberi kuliah mengenai logika dan filsafat di Universitas John Hopkins dan Harvard. Peirce melakukan percobaan untuk menentukan kepadatan dan bentuk bumi, serta mengembangkan sistem logika yang diciptakan oleh ahli matematika Inggris George Boole (1815-1864). Peirce paling dikenal melalui gagasan sistem filsafatnya, yang kemudian dinamakan *pragmatism*. Menurut sistem ini, signifikansi sebuah teori atau model terletak pada efek praktis penerapannya. Model tanda yang dibangunnya menjadi sangat berpengaruh, dan membentuk sebagian besar karya kontemporer mengenai semiotika kontemporer. (Danesi, 2012 : 33)

Peirce menyebut tanda sebagai representamen dan konsep, benda, gagasan, yang diacuhnya sebagai objek. Makna (impresi, kogitasi, perasaan dan seterusnya) yang diperoleh dari sebuah tanda oleh Peirce diberi istilah interpretan. Tiga dimensi ini selalu hadir dalam signifikasi. Oleh karena itu, Peirce memandang sebagai sebuah struktur triadik.



Peirce mengidentifikasi 66 jenis tanda yang berbeda dan tiga diantaranya lazim digunakan dalam pelbagai karya semiotika. Ketiganya adalah ikon, indeks dan simbol. Ikon adalah tanda yang mewakili sumber acuan melalui sebuah bentuk replikasi, simulasi atau persamaan. Indeks adalah tanda yang mewakili sumber acuan dengan cara merujuknya atau mengaitkannya (secara eksplisit dan implisit) dengan sumber acuan lain. Simbol adalah tanda yang mewakili objeknya melalui kesepakatan atau persetujuan dalam konteks spesifik.



Model semiotika tidak membuat perbedaan antara decoder dan encoder. Interpretan adalah konsep mental pengguna tanda, baik dia sebagai pembicara, penulis atau pembaca, pelukis atau penikmat lukisan. Decoding merupakan tindakan aktif dan kreatif, begitu juga halnya dengan encoding.

Semiotika memandang komunikasi sebagai pembangkit makna dalam pesan – baik oleh penyampai maupun penerima (encoder atau decoder). Makna bukanlah konsep mutlak dan statis yang bisa ditemukan dalam kemasan pesan. Pemaknaan merupakan proses aktif. (Laksmi, 2012:107)

Makna merupakan hasil dari interaksi dinamis antara tanda, interpretan, dan objek: makna secara historis ditempatkan dan mungkin akan berubah seiring dengan perjalanan waktu. Istilah Peirce semiosis dianggap lebih aktif untuk tindak pertandaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki asumsi-asumsi filosofis, strategi-strategi penelitian, dan metode-metode

pengumpulan, analisis dan interpretasi data beragam. Meskipun prosesnya sama, prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi-strategi penelitian yang berbeda-beda. (Mulyana dan Salatun, 2008:11)

Peneliti sebagai instrument kunci (*researcher as key of instrument*), mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi data koran online kompas.com pada edisi Maret hingga Juni 2020, observasi perilaku atau wawancara dengan partisipan. Beragam sumber data (*multiple source of data*) dari berita kompas.com, seperti wawancara terkait berita zona merah covid 19 dengan cara, observasi dan dokumentasi. Kemudian peneliti mereview semua data tersebut, memberi makna dan mengolahnya ke dalam kategori-kategori atau tema-tema yang melintasi semua sumber data sesuai dengan teori semiotika Charles Sander Peirce.

Analisis data induktif (*inductive data analysis*) peneliti membangun pola-pola, kategori-kategori dan tema-temanya dari bawah ke atas, dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Proses induktif ini merupakan usaha peneliti dalam mengolah secara berulang-ulang tema-tema dan data base penelitian hingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh tentang zona merah Covid 19.

Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf) atau gambar-gambar berita kompas.com tentang Zona Merah Covid 19 tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus semiotika, yakni tanda, objek dan interpretan, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar. (Creswell, 2012:274)

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-

prosedur tertentu. Upaya validitas pada penelitian ini yakni mentriangulasikan (*trangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa secara seksama bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema secara koheren. Realibitas kualitatif mengindikasikan bahwa teori yang digunakan peneliti konsisten.

Pada penelitian ini yang menekankan pada mempertanyakan makna dan interpretasi dalam kasus-kasus individual, maka jenis penelitian dengan pola tradisional yang menuntut adanya prinsip generalisasi dinilai kurang masuk akal. Pola pikir tradisional tentang prinsip generalisasi ini justru membatasi kemampuan seorang peneliti untuk mengkonseptualisasi ulang peran ilmu-ilmu sosial dalam bidang pendidikan dan humaniora. (Denzim & Lincoln, 2009:271).

HASIL DAN PEMBAHASAN

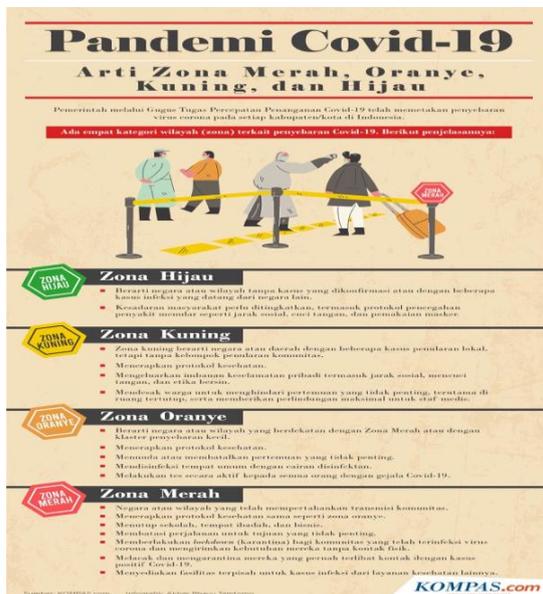
Sejak pemerintah mengumumkan Covid 19 telah menginfeksi warga negara Indonesia, maka pemerintah mengambil langkah-langka antisipasi agar Covid 19 tidak cepat menyebar ke masyarakat, selain itu menyiapkan beberapa fasilitas perawatan kesehatan, berupa rumah sakit dan tempat untuk karantina pada orang yang terjangkit Covid 19. Pemerintah menyiapkan 800 lebih rumah sakit untuk menangani penderita Covid 18, baik milik pemerintah, TNI, Polri, BUMN dan swasta.

Pemerintah juga menambah fasilitas perawatan bagi penderita Covid 19 yakni ditambah lagi dengan rumah sakit yang dibangun secara mendadak yakni Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid 19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta dan RSD Covid 19 Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Berita tentang Covid 19 ini dengan mudah diakses, baik melalui media massa, koran, radio dan televisi serta portal berita ditambah lagi dengan media sosial. Beragamnya informasi yang bertebaran di jagad maya ini justru membuat informasi tentang Covid 19 semakin carut marut. Banyak informasi yang bohong (hoax) dan menyesatkan bertebaran khususnya di jagad maya, media sosial. Pemerintah pun secara sigap mengantisipasi penyebaran berita

bohong tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri, banyak juga portal berita baik yang afiliasi dengan media massa maupun berdiri tunggal yang turut menyebarkan berita bohong, karena kekurangakurasian dan kehati-hatian dalam menyeleksi berita.

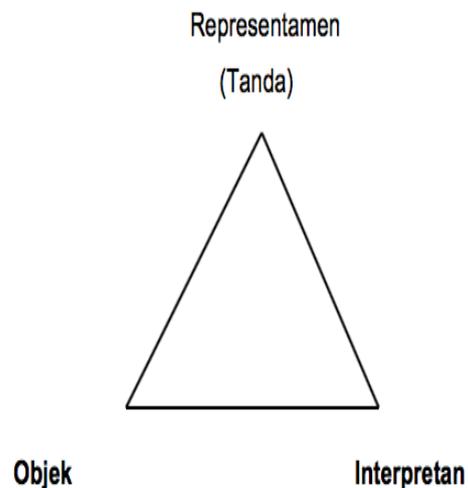
Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada berita di media portal berita online www.kompas.com. Pilihan pada berita [kompas.com](http://www.kompas.com), mengingat portal berita ini menjadi rujukan banyak orang di negeri ini. Berita [kompas.com](http://www.kompas.com) yang dikumpulkan untuk bahan analisa semiotika yakni berita [kompas.com](http://www.kompas.com) yang memuat berita tentang zona merah Covid 19. Berdasar data berita di [kompas.com](http://www.kompas.com), istilah zona merah muncul pertama kali dalam pemberitaan pada 5 Juni 2020. Pada berita [kompas.com](http://www.kompas.com) tidak dijelaskan penjelasan dari pemerintah tentang arti zona merah, zona orange, zona kuning dan zona hijau. Kompas.com justru mengutip keterangan dari laman New England Complex System Institute (2/3/2020), yang dipublikasikan oleh Chen Shen dan Yaneer Bar-Yam.



Pemerintah Republik Indonesia tidak memberi penjelasan secara rinci dan detail tentang kondisi suatu wilayah mendapat status zona merah. Menteri kesehatan, Gugus Tugas Covid 19 dan Menkominfo serta Presiden sekalipun tidak menjelaskan makna warna merah tersebut. Pemerintah hanya memberi petunjuk protokol kesehatan pada daerah yang dinyatakan zona merah.

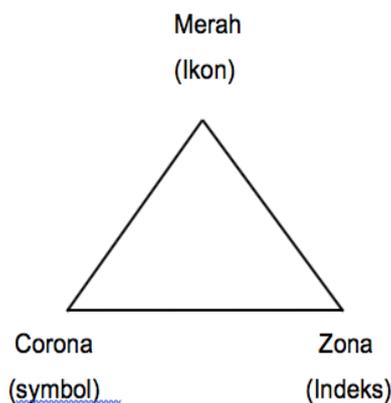
Pemberian warna pada Zona, Merah, Orange, Kuning dan Hijau ini berdasarkan keterangan pemerintah hanya sebagai status kewaspadaan dan menerapkan protokol kesehatan. Demikian yang diunggah oleh seorang dokter pemerintah. Tidak ada penjelasan resmi yang detail, sehingga masing-masing kepala daerah memberi makna dan tafsir tersendiri pada daerah pemerintahannya.

Berdasarkan analisis semiotika Charles Sander Peirce, istilah zona merah dapat dimaknai dengan tiga hal yakni Representamen (tanda), objek dan interpretan. Representamen atau tanda dalam konsep analisis Peirce ini pada kajian ini adalah zona merah. Zona merah merupakan tanda yang berlokasi awal di Jakarta, sebagai tempat penerapan pertama sebuah wilayah dengan predikat zona merah. Pada kajian ini objek yang dikaji adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Adapun yang menjadi interpretan yang menjadi kajian pada penelitian ini yakni pemerintah DKI Jakarta, yang dipimpin oleh Anies Baswedan dan masyarakat Kota Jakarta dan kota-kota di sekitar Jakarta yang beraktivitas dalam bentuk kerja formal maupun nonformal dan informal di Jakarta. Mereka adalah pemberi makna dan menafsirkan makna zona merah yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan DKI Jakarta.



Peirce mempertajam lagi makna representamen atau tanda menjadi tiga yakni ikon, indeks dan simbol. Ketiga turunan makna dari tanda ini dimaksudkan agar dalam memaknai tanda interpreter akan lebih detail dengan acuan tiga hal tersebut.

Pada konteks zona merah ini yang menjadi ikon adalah merah. Warna merah yang dibanding dengan kata zona ini memerlukan pemaknaan khusus agar pengguna atau interpreter dapat memahami dan memiliki kesadaran bersama tentang kata merah pada diksi zona merah. Adapun indeksnya mengacu pada kata zona, atau wilayah, atau kawasan yang memiliki batas tegas. Simbol pada kasus zona merah ini adalah corona atau mahkota, sehingga covid 19 disimbolkan dengan mahkota, sebagaimana dipakai oleh para raja-raja.



Kata merah dalam liputan berita kompas.com tidak ada satupun yang menjelaskan apa makna kata merah pada diksi zona merah. Apakah merah ini diartikan sama dengan warna merah pada lambang negara Merah Putih, dimana kata merah diartikan berani. Tentu merah pada zona merah bukan diartikan berani, namun lebih dekat dengan makna larangan sebagaimana lampu merah, yang dimaknai semua orang wajib berhenti dan tidak berjalan melintasi batas.

Penulis lebih memaknai kata merah diidentikkan dengan lampu merah pada *traffic light*, yang dapat maknai secara universal, bukan hanya di Indonesia. Merah dalam arti larangan, sehingga bila dikaitkan ikon merah dengan indeks zona, dapat dimaknai sebagai suatu kawasan dimana masyarakat luar dilarang memasuki lokasi

tersebut, begitu juga sebaliknya masyarakat yang berada di dalam lokasi zona merah tidak diizinkan untuk keluar lokasi zona merah.

Pemberian tanda atau representamen zona merah ini untuk menegaskan simbol Covid 19, bahwa lokasi zona merah adalah lokasi yang sudah membahayakan. Maknanya adalah masyarakat di dalam zona merah itu tidak diperkenankan untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar zona merah. Hal ini terkait dengan keberadaan virus corona yang sudah menyebar di zona merah tersebut. Oleh karena itu, pada zona merah, pemerintah memberlakukan protokol kesehatan sebagaimana dimuat oleh kompas.com pada edisi 5 Juni 2020.

Kendati warna merah pada zona merah ini dapat dimaknai identik dengan merah pada *traffic light* di perempatan jalan di kota-kota, namun sangat disayangkan pemerintah tidak memberi keterangan yang jelas kondisi daerah yang layak diberi predikat zona merah. Pada pemberitaan kompas.com, dari hasil liputan maupun hasil jumpa pers dengan kepala daerah DKI Jakarta, Anies R Baswedan tidak ada satu kalimat pun yang menjelaskan pada kondisi seperti apa, sehingga interpretasi, khususnya masyarakat dapat memaknai secara bersama.

Keragaman kebijakan muncul sejak adanya status zona merah di daerah di negeri ini, ada kepala daerah yang tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bahkan ada yang sejak awal berkeinginan menetapkan PSBB, sebagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan. Tidak ada keterangan lebih jelas dasar kebijakan penerapan PSBB di Jakarta, selain setelah Jakarta mendapat status sebagai zona merah dari pemerintah pusat Jakarta.

Bila merujuk pada jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2020, berdasarkan data BPS sebanyak 10,57 juta jiwa, dan pada awal 10 Mei 2020 sebagai awal penerapan PSBB di DKI Jakarta 1.719 kasus positif Covid 19, sebanyak 82 orang dinyatakan sembuh dan 155 orang meninggal dunia. Jumlah kasus tersebut bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta, 0,0162 %.



Rata-rata jumlah penduduk yang meninggal dunia pada tahun 2019 sebanyak 5.000 per bulan. Pada musim pandemik Covid 19 ini jumlah warga DKI yang meninggal diperkirakan akan meningkat. Perbandingan jumlah penduduk yang meninggal akibat wabah pada tahun 2019 sebanyak 365 jiwa. Adapun yang penduduk yang meninggal akibat wabah dari tahun 2017-2019 sebanyak 1.182 jiwa.

Berdasar data kematian akibat wabah, bisa dipastikan pada tahun ini (2020) jumlah penduduk Jakarta yang meninggal terus bertambah. Pada saat istilah zona merah diumumkan pemerintah, di DKI Jakarta, tercatat jumlah korban meninggal akibat Covid 19 sebanyak 532 orang. Jumlah tersebut melebihi jumlah orang meninggal akibat wabah pada tahun 2019 di DKI Jakarta.

Berdasarkan penelitian ini, pemberian predikat zona merah pada sebuah lokasi khususnya di 66 RW di Jakarta, ditentukan oleh pemerintah. Warga setempat di RW sama sekali tidak memahami mengapa daerahnya disebut zona merah. Apakah karena perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah orang yang terjangkit Covid 19 menunjukkan presentase tertentu. Pemerintah tidak memberikan detail penjelasan, sehingga masyarakat hanya menerima informasi tanpa kejelasan makna merah. Demikian juga sebaliknya, pada warga masyarakat yang berada di luar zona merah juga tidak memiliki referensi yang cukup sehingga mereka lebih leluasa dalam beraktifitas dibandingkan dengan warga yang berada di daerah zona merah.

Perubahan status zona merah menjadi zona orange, atau zona kuning atau bahkan zona hijau, juga dari pemerintah DKI Jakarta tidak dilengkapi data bahwa daerah tersebut berapa jumlah orang yang sembuh dari Covid 19, penurunan jumlah orang yang meninggal akibat Covid 19 dan berapa jumlah orang yang tidak terjangkit.

Pemaknaan zona merah menjadi subyektif dan menjadi hak prerogatif pemerintah DKI Jakarta dan Gugus Tugas Covid 19 serta Kementerian Kesehatan RI. Masyarakat tidak memiliki data sedikitpun tentang mengapa ada perubahan status dari zona merah menjadi zona hijau. Masyarakat hanya sebagai objek yang harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah.

Kurangnya penjelasan yang disampaikan pemerintah di media massa khususnya kompas.com ini tentu berakibat pada kurangnya perhatian masyarakat pada protokol kesehatan yang diajarkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada 19 Juni 2020, dimana pemerintah DKI Jakarta menerapkan istilah baru yakni PSBB Transisi, masyarakat langsung merespon dengan beraktifitas seperti tidak sedang terjadi adanya pandemik Covid 19. Kendati pemerintah memberi ruang sedikit bebas dengan protokol kesehatan yakni menjaga jarak dengan sesama manusia sekitar 1-1,5 meter dimana pun berada khususnya di ruang publik, baik di tempat fasilitas umum, di kantor, maupun di kendaraan umum. Masyarakat juga tetap diwajibkan menggunakan masker ketika beraktifitas di luar rumah dan selalu mencuci tangan dengan sabun setiap akli melakukan aktifitas yang bersentuhan dengan benda dan manusia.

Masyarakat hanya dapat memaknai zona merah dengan ketatnya protokol yang diterapkan pemerintah. Tidak ada lembar poster maupun keterangan pers, dengan menurunnya jumlah orang yang terjangkit Covid 19 sekian persen dengan rasio tertentu, maka daerah tersebut sudah tidak masuk dalam kategori zona merah, dan protokol kesehatan berubah khususnya pada saat masa Pembatasan Sosial berskala Lokal (PSBL) di DKI Jakarta.

Selain belum adanya keterangan yang menjelaskan secara detail mengapa ada status zona merah dan diberlakukan

protokol kesehatan namun dalam realitasnya masih ada anggota masyarakat yang tersang Covid 19 ini, tentu membuat masyarakat menjadi menafsirkan untuk diri dan keluarganya. Apalagi keberadaan PSBB dimaknai bahwa masyarakat harus berkorban untuk kesehatan dengan rela menerima kenyataan pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pemotongan gaji di kantor terpanta bekerja.

Kurangnya penjelasan pemerintah di media massa termasuk kompas.com membuat masyarakat menunggu saat yang tepat untuk kembali beraktivitas dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan dapat dikatakan hanya dipatuhi oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang secara ekonomi mampu meski tidak bekerja, dan tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

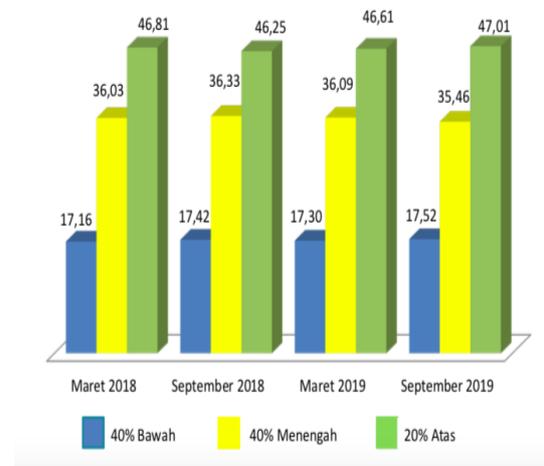
Masyarakat kelas menengah bawah yang merasa terdampak langsung PSBB menjadi pengangguran dan tidak memiliki kesiapan untuk tidak melakukan aktivitas usaha atau bekerja untuk mendapatkan nafkah tentu terus mempertanyakan kebijakan penerapan zona merah dan PSBB. Pasalnya dengan adanya zona merah, maka dimaknai dapur mereka tidak ngebul atau tidak ada stok makanan untuk dimakan.

Kondisi zona merah menjadi lebih tragis lagi bila dikaitkan dengan kebijakan di dunia Pendidikan, di saat PSBB di lokasi zona merah, anak-anak didik wajib belajar dengan menggunakan sistem online. Akibat yang muncul adalah biaya yang lebih besar yakni, perlu biaya tambahan untuk membeli perkat smartphone yang sesuai dengan kebutuhan belajar online, selain itu orang tua juga harus menyiapkan data internet berupa pulsa yang setiap hari harus siap, karena tugas dari guru dan dosen terus mengalir setiap saat dan wajib dikumpulkan pada jam dan hari yang tepat.

Zona merah akhirnya dimaknai kondisi kehidupan juga merah, artinya kondisi fisik dan psikis memasuki warna merah, karena tidak ada asupan dan bantuan yang datang ke masyarakat. Pemerintah pun memberi bantuan tidak sesuai dengan kenyataan. Semua anggota masyarakat terdapat Covid 19 merasakan kesulitan

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian, namun pemerintah hanya perhatian pada kelompok masyarakat yang sudah tidak mampu sebelum Covid 19. Padahal jumlah anggota masyarakat yang terdampak oleh Covid 19 dan akibat PHK serta pengurangan pendapatan terus bertambah. Namun realitasnya pemerintah terus menerus menetapkan zona merah yang dimaknai masih ada Covid 19 yang membahayakan.

Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk,
Maret 2018– September 2019



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ini masyarakat miskin di Jakarta terus bertambah. Jumlah tentu akan terus bertambah besar dengan adanya status zona merah dan penerapan PSBB yang terus diperpanjang. Zona merah yang ditetapkan pemerintah sebagaimana menurut teori Semiotika Peierce, memberi simbol baru, yakni munculnya kemiskinan baru di perkotaan Jakarta.

Pemerintah seyogyanya membuat program percepatan pemulihan ekonomi untuk daerah di Jakarta yang sudah tidak berstatus zona merah. Hal ini agar tidak mengesankan pemerintah hanya konsentrasi terhadap pencegahan Covid 19 namun kurang peka terhadap indeks kebutuhan hidup dan kondisi ekonomi masyarakat yang juga memasuki zona merah, artinya sudah memasuki zona miskin baru perkotaan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis semiotika Zona Merah di Ibukota DKI Jakarta ini penulis menyimpulkan tiga hal:

1. Representamen atau tanda merah pada zona merah di liputan kompas.com belum dilengkapi dengan arumentasi jumlah orang yang terserang Covid 19 atau rasio jumlah yang terserang dengan jumlah pendudukan di zona tersebut.
2. Ibukota DKI Jakarta sebagai Objek, pada analisis semiotika Peirce ini, menjadi pusat penyebaran Covid 19 atau episentrum Covid 19, karena semua orang berakses dengan Jakarta, baik dari luar Jakarta di dalam negeri maupun dari luar negeri. Jakarta menjadi kota yang penting sebagai ibukota negara sehingga mobilitas masyarakat sangat tinggi dan rentan terhadap meluasnya Covid 19.
3. Interpretasi atau pemaknaan, dalam hal ini masyarakat yang memaknai status zona merah dengan keterbatasan informasi yang disuguhkan kompas.com. Masyarakat memnafsirkan sendiri status zona merah, yang dimaknai selain harus berdiam diri di rumah dan tidak bekerja serta siap menerima realitas PHK atau pemotongan gaji bulanan selama ada zona merah.

Saran

Semua negara mengalami musibah yang sama akibat adanya pandemik Covid 19, sehingga tidak satupun kepala negara yang memiliki referensi yang kuat untuk menghadapi pandemik Covid 19 ini. Pemerintah Indonesia juga demikian, gagap dalam menghadapi pandemik Covid 19 ini, terlihat dari cara penangannya, yang terkesan terlambat. Pemerintah daerah pun memiliki pemaknaan sendiri untuk menyelesaikan pandemi Covid 19 ini, hal ini menyebabkan beragam kebijakan muncul di setiap daerah. Untuk itu perlu adanya sikap terbuka pemerintah dalam menangani pandemik Covid 19 ini tidak menjadi ajang

diskursus berkepanjangan yang meresahkan masyarakat.

Tulisan hasil penelitian ini masih banyak celah untuk dilengkapi termasuk zona merah yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat. Penelitian ini akan sangat bernilai bila ada akademisi yang melanjutkan penelitian tentang dampak zona merah pada kemiskinan masyarakat perkotaan di DKI Jakarta ini. Kendati demikian penelitian ini dapat dijadikan acuan dunia akademik maupun praktisi komunikasi dan public relations.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro, Lukiati Kumala, Siti Karlinah, 2007, Komunikasi Massa, Suatu Pengantar, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Asa Burber, Arthur, 2015, Pengantar Semiotika, Tanda-tanda dalam kebudayaan kontemporer, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Danesi, Marcel, 2012, Pesan, Tanda dan Makna, buku teks menegani semiotika dan teori komunikasi, Jalasutra, Yogyakarta.
- Fiske, John, 2010, Cultural and Communication Studies, sebuah pengantar paling komprehensif, Jalasutra, Yogyakarta.
- Hoed, Benny H, 2014, Semiotik & Dinamika Sosial Budaya, Komunitas Bambu, Depok, Jawa Barat.
- Laksmi, 2012, Interaksi, Interpretasi dan Makna, Pengantar Analisis Mikro untuk Penelitian di Bidang Ilmu Informasi dan Ilmu terapan lainnya, Karya Putra Darwati, Bandung
- Littlejohn, Stephen W, Karen A Foss, 2009, Teori Komunikasi, Theories of Human Communication, Salemba Humanika, Jakarta.
- Mulyana, Dedy dan Salatun, 2008, Metode Penelitian Komunikasi, Contoh-contoh penelitian kualitatif dengan pendekatan praktis, Rosda Karya, Bandung.
- Oetama, Jakob, 2004, Pers Indonesia, berkomunikasi dalam masyarakat tidak tulus, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Ricoueur, Paul, 2014, Teori Interpretasi, membelah makna dalam anatomi teks, IrChisod, Yogyakarta.

Thwaties, Tony, Llyods Davis, Warwick Mules, 2009, *Introducing Cultural And Media Studies*, sebuah pendekatan semiotika, Jalasutra, Yogyakarta.

Media Online

<https://www.who.int/data/gho> diunduh pada 3 Juli 2020 pukul 13.00 wib

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all> diunduh pada 3 Juli 2020 pukul 13.10 wib.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/30/17053411/gugus-tugas-petakan-risiko-penyebaran-covid-19-jadi-zona-hijau-kuning-oranye>. diunduh pada 3 Juli 2020 pukul 13.50 wib.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/10/11463731/update-10-april-pasien-positif-covid-19-di-jakarta-tembus-1719-orang>

<http://statistik.jakarta.go.id/pelaporan-kematian-periode-januari-desember-2019-dan-januari-april-2020-di-provinsi-dki-jakarta/>